

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Administrasi publik memiliki peran sentral dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna mencapai suatu tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebagai administrator, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki wewenang dan kemampuan yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya khususnya di bidang pangan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, artinya adalah kebutuhan dasar manusia yaitu pangan harus mampu dihadirkan oleh pemerintah agar masyarakat mampu hidup sejahtera baik secara lahir maupun batin. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan kesejahteraan yang paling fundamental karena jika tidak terpenuhi maka kehidupan seseorang dapat dikatakan tidak layak / sejahtera. Pemenuhan akan kebutuhan pangan sangat penting karena dapat menentukan kualitas sumber daya manusia.

Pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan yang berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi oleh Negara dimana hal tersebut mempunyai arti dan manfaat yang sangat besar untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia. Namun pada kenyataannya sampai saat ini, masalah rawan pangan kerap menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik masyarakat.

Ong Keng Yong dalam *Center for Indonesian Policy Studies* (2017) menyatakan, kekhawatiran mengenai ketersediaan pangan bagi populasi dunia yang diperkirakan akan mencapai 9,7 milyar orang pada tahun 2050 karena persediaan yang ada diprediksi tidak akan dapat memenuhi jumlah kebutuhan. Sementara itu, sejumlah pengamat lainnya menyangkal hal tersebut dengan argumen bahwa hingga saat ini total makanan yang diproduksi melebihi jumlah yang sesungguhnya dikonsumsi dan dibutuhkan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, masalah kelaparan masih kerap terjadi di berbagai wilayah Asia dan Afrika. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan bukan hanya mengenai jumlah yang mencukupi, melainkan juga bagaimana menyediakan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan.

Indonesia yang terkenal sebagai negara agraris yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok secara mandiri khususnya beras,

bahkan masih melakukan impor dari negara lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, impor beras Indonesia sepanjang triwulan pertama 2018 mencapai 384 ribu ton dengan nilai US\$ 180,62 juta. Jumlah tersebut terdiri atas impor di Januari sebanyak 13 ribu ton, Februari 273 ribu ton dan Maret 98 ribu ton. Mundurnya panen raya padi serta turunnya stok beras dalam negeri membuat pemerintah melakukan impor beras untuk stabilisasi harga beras lokal. Impor beras dalam tiga bulan pertama tahun ini jauh lebih tinggi dari triwulan yang sama tahun sebelumnya yang hanya seberat 46 ribu ton, namun lebih rendah dibanding triwulan I 2016 yang mencapai 982 ribu ton. Impor beras sepanjang triwulan I 2018 juga lebih besar dibanding akumulasi impor beras sepanjang tahun lalu yang hanya mencapai 305 ribu ton.

Ketahanan / kedaulatan pangan sering juga dikaitkan dengan masalah ketersediaan pangan. Banyak faktor penghambat yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan di masyarakat Indonesia khususnya bahan pangan strategis yaitu beras, mulai dari faktor produksi, distribusi, maupun ketetapan harga. Dalam hal produksi misalnya dari mulai masa tanam hingga panen, para petani sudah dihadapkan dengan berbagai kendala. Sebagai contoh, mulai dari masa tanam padi petani sudah berhadapan dengan masalah iklim, banjir, serta hama yang mengganggu produktivitas tanaman padi tersebut. Khusus untuk hal penanganan hama tanaman padi, diperlukan solusi yang efektif dan efisien, agar tidak terjadi penurunan produktivitas padi akibat serangan hama. Selain itu diperlukan pula pengetahuan petani untuk bisa mengenali jenis-jenis hama tanaman padi agar petani dapat segera mengidentifikasi serta menerapkan metode pengendalian

secara tepat, cepat, dan akurat. Terdapat beberapa hama utama yang paling sering menyerang tanaman padi para petani, di antaranya adalah : wereng, keong mas, penggerek batang, tikus, dan burung. Perlu adanya peran serta dari pemerintah secara langsung guna memberikan edukasi maupun membuat kebijakan yang mampu mendorong para petani agar tetap menjaga produktivitas padi mereka. Dengan terkendalinya serangan hama maka tujuan dari budidaya akan lebih mudah tercapai. Pada dasarnya segala macam bentuk permasalahan ketahanan pangan perlu ditangani dengan melakukan perencanaan yang baik, penggunaan sumber daya yang efisien, serta menentukan visi dan misi ke depan yang jelas.

Peran pemerintah dalam meningkatkan produksi bahan pangan khususnya produksi padi di Indonesia sudah dituangkan dalam RKP (Rencana Kinerja Pemerintah) Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS tahun 2018 tentang prioritas pembangunan nasional ketahanan pangan disebutkan bahwa program prioritas dalam ketahanan pangan memiliki dua point utama, yaitu peningkatan produksi pangan serta pembangunan sarana-prasarana pertanian. Dua point utama tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Dalam pelaksanaannya Kementerian Pertanian mempunyai kegiatan prioritas, yaitu melakukan peningkatan dalam produksi padi, jagung dan kedelai. Selain itu, mereka juga memiliki fokus kegiatan salah satunya adalah pengamanan produksi dari gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) atau biasa disebut dengan hama tanaman. Semua program tersebut perlu dilaksanakan dengan baik

agar mendapatkan *outcome* yang sesuai dengan target yang telah direncanakan oleh pemerintah sehingga hasilnya bisa dinikmati langsung oleh masyarakat.

Upaya dalam meningkatkan produksi padi dari berbagai provinsi di Indonesia saat ini masih terus menjadi fokus pemerintah, seiring dengan kebutuhan konsumsi beras masyarakat Indonesia yang semakin meningkat. Berdasarkan data dari BPS tentang rata-rata konsumsi per kapita (seminggu) bahan makanan mulai tahun 2014-2016 mengalami kenaikan sebagai berikut :

**Tabel 1.1** Rata-rata konsumsi beras per kapita (seminggu) tahun 2014-2016

Jenis Bahan Makanan	Satuan	2014	2015	2016
Beras	(kg)	1,626	1,631	1,668

*Sumber : Statistik Indonesia, BPS (2017)*

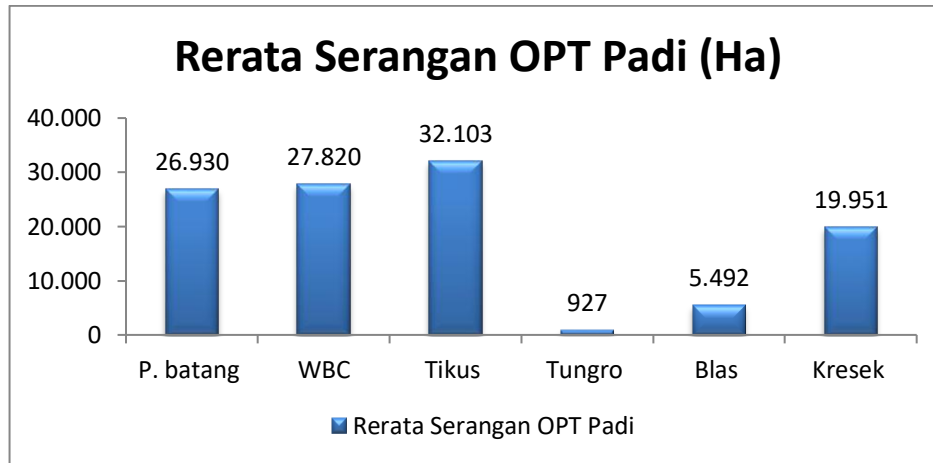
Dari data konsumsi rata-rata setiap orang di Indonesia di atas nampak bahwa tiap orang mampu menghabiskan sekitar 1,64 kg beras dalam waktu 1 minggu, dan jika dikalikan dalam sebulan kira-kira setiap orang memerlukan sekitar 6,56 kg beras untuk dikonsumsi sehingga dalam setahun tingkat konsumsi beras yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 78,72 kg beras/orang.

Jawa tengah merupakan salah satu Provinsi penyangga bahan pangan tingkat nasional. Dari beberapa komoditas tanaman pangan utama di Jawa tengah, padi sawah merupakan komoditas yang menyumbang nilai luas panen dan produksi terbesar dibandingkan dengan tanaman pangan lain. Kontribusi Jawa

Tengah terhadap produksi bahan pangan, khususnya beras di Indonesia, tidak kurang dari 15 %. Berdasarkan perhitungan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2017, di antara luas panen beberapa komoditas tanaman pangan di Jawa Tengah pada periode bulan Juni 2017 tanaman padi memiliki luasan panen terbesar dibandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya seperti jagung, kacang dan kedelai, yaitu seluas 237.973 Ha. Pengamanan terhadap produksi padi (beras) ini harus diupayakan semaksimal mungkin, agar produksinya semakin meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan khususnya beras. Untuk dapat melaksanakan panen dengan produksi maksimal, terdapat beberapa kendala, antara lain adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Terdapat beberapa OPT utama yang menyerang tanaman padi di Jawa Tengah di antaranya adalah hama penggerek batang, wereng batang coklat (WBC), tikus, penyakit hawar daun bakteri/kresek, dan blas. (Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, 2017).

Berdasarkan data rerata luas tambah serangan OPT selama 6 (enam) tahun terakhir (2009-2015), serangan hama tikus menunjukkan luasan tertinggi, mencapai 32.103 ha, kemudian diikuti serangan WBC (Wereng Batang Coklat) seluas 27.820 ha, penggerek batang seluas 26.930 ha, selanjutnya adalah Kresek seluas 19.951 ha, Blas 5.492 ha, dan yang terakhir adalah serangan Tungro 927 ha (Grafik 1). Hal ini menunjukkan bahwa perlu perhatian khusus untuk menurunkan luas serangan hama tikus di Jawa Tengah. (Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, 2016).

**Grafik 1.1** Rerata serangan (Ha) OPT Padi di Jawa Tengah (2017)



Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, 2017.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) Kabupaten Pati, tingkat produksi beras di daerah Kabupaten Pati selama 2017 mencapai 396.748 ton dan mengalami surplus 283.164 ton karena tingkat konsumsi beras masyarakat di Kabupaten Pati hanya sebanyak 113.584 ton, sedangkan untuk tingkat konsumsi beras masyarakat di Kabupaten Pati dapat dilihat melalui Tabel 1.2 di bawah ini :

**Tabel 1.2** Konsumsi beras masyarakat Pati per kapita tahun 2017

Bahan Makanan	Konsumsi		
	/Tahun	/Bulan	/Minggu
Beras	88,74 Kg	7,395 Kg	1,848 Kg

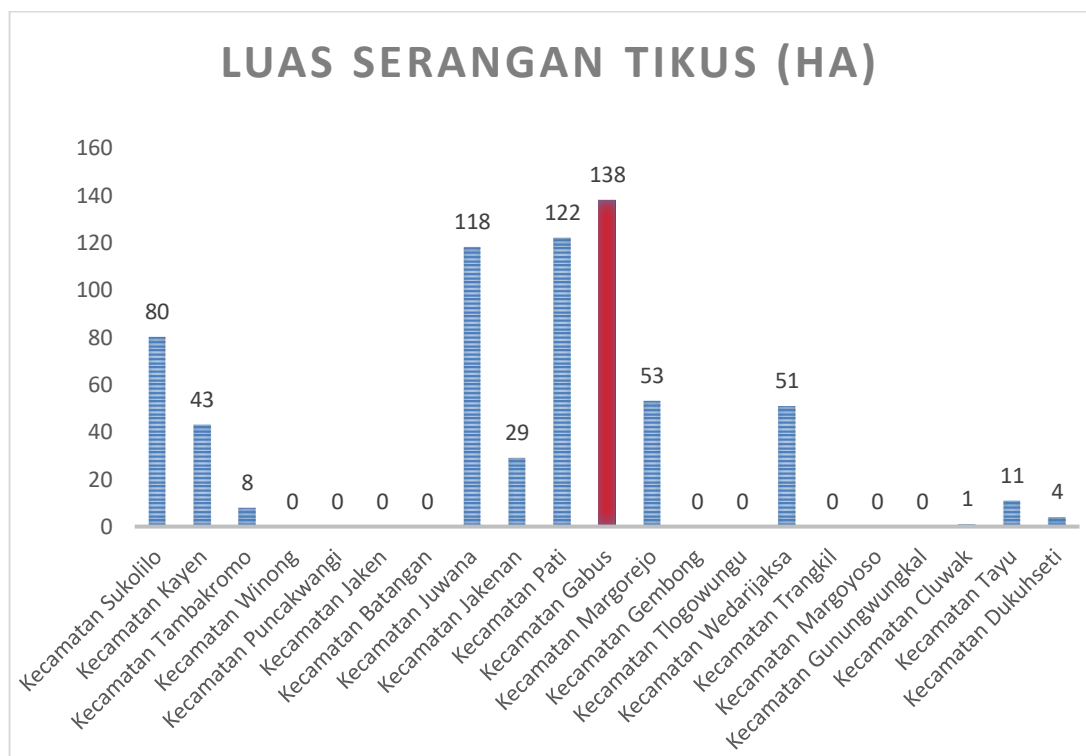
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati, 2017

Berdasarkan data di atas, rata-rata tingkat konsumsi beras setiap orang per kapita per tahunnya sebesar 88,74 kilogram, sedangkan per bulannya sebesar 7,395 kilogram dan tingkat konsumsi per minggu sebesar 1,848 kilogram. Dari beberapa Kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Pati merupakan daerah yang memiliki luasan panen tanaman padi terluas ketiga di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan (Distanbun, 2016). Dengan kondisi tersebut maka patut dilakukan upaya preventif terhadap serangan hama terutama hama tikus yang sering merusak tanaman padi.

Khusus untuk penanganan hama tikus sawah (*Rattus argentiventer*) yang merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi dari golongan mamalia (binatang menyusui), mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan jenis-jenis hama utama padi lainnya. Oleh karena itu, dalam pengendalian hama tikus ini, diperlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan cara penanganan hama padi dari kelompok serangga. Menurut Singleton (2003), tikus sawah dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman padi mulai dari saat pesemaian padi hingga padi siap dipanen, dan bahkan menyerang padi di dalam gudang penyimpanan. Kerugian akibat hama tikus bisa jauh lebih besar lagi karena kerusakan pada periode pesemaian dan stadium padi vegetatif tidak termasuk kerugian yang dilaporkan. Kehilangan hasil padi akibat tikus sawah di 11 negara Asia (Banglades, Kamboja, Cina, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam) diperkirakan mencapai 5-10%. Apabila dihitung kerugian sebesar 5% saja, nilainya setara dengan 30 juta ton beras dan cukup untuk memberi makan 180 juta orang selama 12 bulan.

Kabupaten Pati terdiri atas 21 Kecamatan. Dari total 21 Kecamatan tersebut terdapat Kecamatan yang menjadi daerah endemis hama tikus dan mendapatkan serangan tertinggi di Kabupaten Pati, yaitu Kecamatan Gabus. Daerah ini sering mengalami gagal panen akibat dari serangan hama tikus. Untuk mengetahui data luas serangan hama tikus di seluruh Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pati pada tahun 2017 dapat dilihat melalui Diagram 1.1 berikut ini :

**Diagram 1.1** Luas serangan hama tikus pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Pati tahun 2017



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 2017

Distribusi keberadaan tikus sawah sangat luas karena dapat beradaptasi dengan baik pada berbagai agroekosistem, baik lahan sawah irigasi, lahan sawah

tadah hujan/lahan kering, maupun lahan sawah rawa pasang surut. Namun demikian keberadaan tikus sawah lebih dominan sebagai hama utama padi di lahan sawah irigasi. Tikus sawah tergolong binatang pemakan dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan (omnivora) sehingga juga berperan sebagai hama pada tanaman hortikultura, perkebunan dan hama gudang. Tikus sawah juga diketahui sebagai vektor penyebab penyakit berbahaya seperti *Leptospirosis*, *Rat Bite Fever* pada manusia dan binatang ternak (Begon, 2003).

Serangan hama tikus terbesar di Kabupaten Pati terjadi pada tahun 2013, yang secara masif menyerang sedikitnya 1.615 hektare lahan pertanian di Kabupaten Pati. Para petani sempat dibuat bingung dengan keadaan tersebut. Geropyokan dan pemasangan setrum listrik tidak berhasil mengatasi ganasnya serangan tikus. Bahkan, tak jarang setrum listrik yang dipasang untuk membunuh tikus justru menewaskan beberapa pemilik sawah, seperti kejadian yang diilansir oleh harian WARTAPATI (4 Maret 2017). Warga desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, meninggal di lokasi areal persawahan yang dipasangi aliran listrik untuk mencegah hama tikus, dan baru ditemukan oleh warga pada pukul 06.00 WIB keesokan harinya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pati menginstruksikan kepada petani untuk tidak lagi menggunakan listrik/ setrum sebagai alat pembasmi hama tikus.

Pengendalian tikus sawah relatif lebih sulit karena sifat biologi dan ekologi yang berbeda dibandingkan dengan hama padi lainnya, sehingga diperlukan penanganan khusus yang bertujuan untuk menekan jumlah populasi tikus menjadi serendah mungkin melalui berbagai metode dan teknologi

pengendalian. Berbagai upaya pengendalian terhadap hama tikus telah dilakukan antara lain dengan gropyokan dan sanitasi lingkungan, pengemposan, pemberian umpan beracun, pemasangan pagar plastik, pemasangan bubu, pemasangan jaring dan lain-lain, namun luas serangan hama tikus masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. (Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, 2016).

Menurut Sudarmaji dan Anggara (2006), berdasarkan hasil penelitian yang komprehensif oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, telah direkomendasikan alternatif-alternatif pendekatan pengendalian tikus sawah yang telah terbukti efektif, yaitu dengan pengendalian hama tikus terpadu (PHTT). Pengendalian Hama Tikus Terpadu (PHTT) adalah pengendalian tikus yang didasarkan pada pemahaman ekologi tikus. dilakukan secara dini, intensif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi pengendalian yang sesuai dan tepat waktu. Pelaksanaan pengendalian dilakukan oleh petani secara bersama-sama (berkelompok) dan terkoordinasi dengan cakupan sasaran pengendalian berskala luas (hamparan atau desa).

Pengendalian yang kemudian diusulkan adalah pengendalian hayati, yang dalam hal ini adalah dengan melakukan upaya manipulasi secara langsung dan sengaja menggunakan musuh alami, pesaing organisme pengganggu, seluruhnya atau sebagian, atau sumber daya yang diperlukan oleh agensia itu untuk pengendalian organisme pengganggu atau dampak negatifnya (Tampubolon, 2004). Dari sekian banyak musuh alami tikus, burung Serak Jawa (*Tyto alba*) dipandang sebagai salah satu predator pengendali tikus yang paling potensial.

Kelebihan *Tyto alba* sebagai pengendali tikus adalah makanan utamanya spesifik tikus, kemampuan berburu sangat tinggi, tangkas, cekatan dalam menyambar tikus, kemampuan mengkonsumsi tikus cukup tinggi (2-3 ekor per malam), mampu membunuh tikus melebihi dari jumlah yang dimakan, kawasan berburu yang tertatur, tidak akan meninggalkan kawasannya selama di kawasan tersebut masih ada tikus, perkembangbiakannya cepat, sepasang *Tyto alba* mampu mengamankan areal persawahan seluas 5 – 10 Ha dan mudah beradaptasi dengan lingkungannya (Sabirin, dkk. 2014).

Dalam upaya menekan peningkatan populasi hama tikus maka perlindungan dan pengembangan burung hantu sebagai predator tikus dipilih sebagai solusi dalam menangani masalah hama yang bertahun-tahun menyerang lahan pertanian di Kabupaten Pati. Pemerintah Kabupaten Pati memutuskan untuk memanfaatkan burung hantu (*Tyto Alba*) karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu petani untuk mengantisipasi dan melindungi tanaman dari serangan hama tikus sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan dan pengembangan burung hantu (*Tyto Alba*) sebagai pemangsa tikus. Dari sisi peraturan, Kabupaten Pati juga telah membuat Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 tahun 2014 yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pengembangan burung hantu jenis *Tyto Alba*. Pembuatan Peraturan Bupati tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta mengacu juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto Alba*) di Kabupaten Pati disebutkan secara garis besar beberapa poin penting dalam upaya mengatur mekanisme perlindungan dan pengembangan burung hantu (*Tyto Alba*) di antaranya adalah tentang penangkaran, perdagangan, pembentukan Lembaga Swadaya Desa, larangan, peran serta masyarakat, pengendalian dan pengawasan, dan sanksi administratif. Sejumlah upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menekan populasi hama tikus secara alami yang menyerang lahan pertanian serta menjaga kelestarian burung hantu (*Tyto Alba*) sebagai pengendali alami hama tikus.

Berdasarkan data yang telah diungkapkan dalam latar belakang penelitian ini, keberhasilan penanganan hama tikus pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Pati dianggap sudah cukup signifikan. Namun berdasarkan hasil observasi implementasi kebijakan Peraturan Bupati Pati Nomor 56 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu *Tyto Alba* khususnya di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati masih belum berjalan secara efektif karena pada kenyataannya terdapat beberapa masalah yang terjadi di lapangan, yaitu salah satunya kurangnya peran serta Pemerintah Kabupaten dalam hal pengawasan burung hantu (*Tyto Alba*), terkesan bahwa terjadi pelimpahan kewenangan dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa. Disamping itu lemahnya sanksi yang diterapkan terhadap para pelanggar peraturan tersebut membuat kebijakan yang telah dibuat terasa kurang efektif. Berdasarkan data terbaru membuktikan bahwa pada tahun 2017 luas serangan hama tikus di Kecamatan Gabus masih yang tertinggi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya, yaitu seluas 138 Ha (lihat halaman 5, Diagram 1.1). Oleh

karena itu, fokus penelitian ini adalah tentang **Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto alba*) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.** Topik ini menarik karena implementasi dari kebijakan perlindungan dan pengembangan burung hantu (*Tyto Alba*) yang diatur dalam Peraturan Bupati Pati nomor 56 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu *Tyto Alba* di Kabupaten Pati seharusnya mampu memberikan solusi dan dampak positif secara langsung bagi petani khususnya di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dalam upaya menekan populasi tikus sawah yang sering merusak tanaman padi mereka. Akan tetapi, walaupun sudah dilakukan implementasi dari Peraturan Bupati tersebut, pada kenyataannya serangan hama tikus masih sering terjadi di Kecamatan tersebut. Selain itu, faktor pendukung serta penghambat dalam proses implementasi kebijakan ini juga harus dianalisis lebih lanjut agar kebijakan ini tepat sasaran, sesuai dengan perencanaan, dan mampu memberikan dampak positif pada masyarakat.

## **1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

1. Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto alba*) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Terdapat indikasi lemahnya pengawasan dan

penerapan sanksi dalam hal perlindungan dan pengembangan burung hantu *Tyto Alba* khususnya di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto alba*) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati perlu diidentifikasi agar dapat dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto alba*) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati?
2. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto alba*) di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto alba*) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto alba*) di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Praktis**

1. Memberikan masukan yang informatif tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto alba*) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, serta untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Memberikan informasi terbaru tentang burung hantu (*Tyto Alba*) bagi Pemerintah Kabupaten Pati dan pihak pengelola karantina di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.
3. Menambah referensi bagi Dinas Pertanian Kabupaten Pati sebagai hasil evaluasi, dan dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu (*Tyto alba*) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.
4. Tambahan referensi dan wawasan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi bagi perkembangan metode penelitian sosial kualitatif, teori Implementasi kebijakan, serta pengembangan teori tentang Perlindungan dan Pengembangan musuh alami yaitu burung hantu (*Tyto Alba*) sebagai pengendali hama tikus.